



Evaluasi Kebijakan Berbasis Responsivitas Terhadap Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Sumatera Barat

Ory Riandini^{1*}, Roni Ekha Putera², Hendri Koeswara³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05/08/2024

Revised 14/08/2024

Accepted 16/08/2024

Abstract

West Sumatra Province has a high risk of tsunami disaster. From this situation description, an appropriate and relevant Contingency Plan is needed so that it can be used effectively when a disaster occurs. This research explains the evaluation of West Sumatra Province's tsunami contingency planning policy based on the descriptor of public policy responsiveness proposed by William Dunn. The approach used in this research is descriptive qualitative with purposive sampling to determine informants. Meanwhile, the data analysis technique uses the triangulation method. The results of the research show that from the descriptor of the responsiveness of West Sumatra's tsunami contingency plan policy there is doubt about its readiness to face this disaster. This is because the necessary measures have not gone through a review process to adapt them to the threats and required resource requirements. From the research findings, it can be explained that the responsiveness descriptor, namely focusing on crucial issues and intensity of preferences, has not been implemented in the West Sumatra tsunami contingency plan policy.

Keywords: Policy Evaluation, Respons, Contingency Plan, Tsunami, West Sumatra

Abstrak

Provinsi Sumatera Barat mempunyai ancaman risiko bencana tsunami yang tinggi. Dari gambaran situasi tersebut, diperlukan Rencana Kontinjensi yang tepat dan relevan agar dapat digunakan secara efektif ketika terjadi bencana. Penelitian ini menjelaskan evaluasi kebijakan perencanaan kontinjensi tsunami Provinsi Sumatera Barat berdasarkan deskriptor responsivitas kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan purposive sampling untuk menentukan informan. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari deskriptor responsivitas kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat diragukan kesiapannya dalam menghadapi bencana ini. Hal ini karena langkah-langkah yang diperlukan belum melalui proses peninjauan untuk menyesuaikannya dengan ancaman dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Dari temuan penelitian dapat dijelaskan bahwa dari deskriptor responsivitas yaitu yang berfokus kepada permasalahan krusial dan intensitas preferensi, belum dilaksanakan dalam kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Responsivitas, Rencana Kontinjensi, Tsunami, Sumatera Barat



*Penulis Korespondensi
E-mail : ory.riandini@gmail.com

PENDAHULUAN

Hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2020 menggambarkan wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi ancaman bencana dengan Tsunami merupakan salah satu ancaman tertinggi. Perhitungan-perhitungan ini menyatakan bahwa ratusan ribu jiwa penduduk berada dalam ancaman gempa bumi raksasa dan tsunami pada masa yang akan datang di Sumatera Barat. Membangun sistem penanggulangan bencana adalah upaya untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana baik ditingkat nasional maupun daerah hingga ke lini terkecil kelompok masyarakat terutama yang tersentuh bencana secara langsung. Pentingnya sebuah sistem dalam penanggulangan bencana dikarenakan keterbatasan pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dalam memberikan bantuan pada saat terjadi bencana. Selain itu sistem ini bertujuan untuk memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki masyarakat sehingga mampu membantu diri, keluarga dan masyarakatnya pada saat terjadi bencana.

Provinsi Sumatera Barat telah merancang dokumen Rencana Kontinjensi (Rencana Kontinjensi) tsunami pada tahun 2012. Dalam dokumen Rencana Kontinjensi tersebut dipaparkan analisis resiko bencana, pengembangan skenario, penentuan kebijakan dan sasaran sektoral, kesenjangan anantara kebutuhan dan sumberdaya, serta pengaturan mekanisme respon baik sistem dan acuan kegiatannya. Skenario yang digambarkan dalam dokumen Rencana Kontinjensi tersebut sesuai

dengan situasi terburuk pada tahun 2012 yakni bencana tsunami terjadi di hari senin pukul 10 pagi, diawali dengan gempa 8,8 SR dengan pusat gempa 150 km barat daya Kota Padang, di perkirakan dampaknya adalah rusak nya sarana dan prasarana di kepulauan Mentawai dan pesisir barat daratan Sumatera Barat dan jumlah korban di Kota Padang yang memiliki kerapatan penduduk tinggi. Provinsi Sumatera Barat memiliki ancaman tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami. Tidak hanya di kota Padang, dampak tsunami juga di khawatirkan sampai pada kabupaten/kota lain di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat. Mengacu pada Rencana Kontinjensi 2012 tersebut, skenario kondisi terburuk yang digambarkan kondisi Kota Padang pada pagi hari di jam kerja, sedangkan saat ini keramaian di sepanjang pantai Padang lebih terlihat pada akhir pekan melebihi kepadatan masyarakat pada jam kerja. Banyak wisatawan baik dari dalam wilayah Sumatera Barat maupun dari luar terlihat memadati wilayah tersebut. Dikhawatirkan para wisatawan ataupun masyarakat yang berada di area tersebut tidak cukup dibekali pengetahuan tentang bencana terutama Tsunami. Dari gambaran situasi tersebut, maka sangat dibutuhkan Rencana Kontinjensi yang sesuai dan update agar dapat digunakan secara efektif pada saat bencana terjadi.

Pada observasi awal dan wawancara dengan salah satu informan perumus Kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat yaitu Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Sumatera Barat menyampaikan bahwa

dokumen kebijakan tersebut pernah dilakukan review pada Tahun 2017 atau lima tahun sejak dokumen disahkan pada tahun 2012 yang lalu dengan fokus hanya kepada perubahan prakiraan resiko tsunami berdasarkan kajian resiko bencana yang telah dilakukan. Lebih lanjut informan tersebut menjelaskan pada Tahun 2017 review yang dilakukan dengan waktu yang sempit di akhir tahun anggaran, sehingga proses review belum menyentuh seluruh aspek secara komprehensif. Proses review tersebut juga kurang melibatkan para pemangku kepentingan lain seperti perangkat daerah setempat, instansi vertikal, dan masyarakat.

Lebih lanjut salah satu Pendiri Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) menyampaikan berdasarkan kondisi tersebut, dokumen kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat belum tersentuh update konten dan substansi yang relevan dengan situasi dan kondisi berkembang pada waktu tersebut. Dimana dalam regulasinya data-data rencana pada dokumen rencana kontinjensi disepakati untuk dimutakhirkan setiap tahun dan dokumen rencana kontinjensi secara keseluruhan berlaku selama tiga (3) tahun. Jika selama waktu yang ditentukan tidak terjadi bencana tsunami, maka dilakukan kaji ulang terhadap rencana kontinjensi. Peneliti Kebijakan dan Manajemen Kebencanaan menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat harus sudah dilakukan review pada Tahun 2022 yang lalu untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Namun sampai pada Tahun 2023 menurut penjelasan dari Peneliti Kebijakan Kebencanaan Zikri Alhadi, proses tersebut belum berjalan karena persoalan prioritas kebijakan dan ketersediaan anggaran

pemerintah yang cukup menurun signifikan dibanding era sebelum Pandemi Covid 19 melanda dunia. Dengan alasan tersebut dokumen kebijakan rencana kontinjensi tsunami yang akan dijadikan acuan dan digunakan ketika bencana tersebut benar-benar terjadi diragukan kesiapan dan relevansinya dengan kondisi yang ada saat ini karena belum mengalami perbaikan baik sisi konten/substansi, keterlibatan para pemangku kepentingan, dan metode penyusunannya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Barat menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi sebagai sebuah kebijakan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana khususnya menghadapi resiko tsunami di Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan perbaikan dan updating dari konten dokumen kebijakan rencana kontinjensi tsunami tersebut. Dengan dinamika yang berbeda saat kondisi pada Tahun 2012 dengan kondisi saat ini dimana dimungkinkan adanya perubahan substansi baik dari aspek penilaian bahaya/resiko, penentuan kejadian, pengembangan skenario, penetapan kebijakan dan strategi, analisis kesenjangan (antara prakiraan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya). Lebih lanjut, Ketua FPRB Sumatera Barat memberikan gambaran pada aspek analisis kesenjangan yang merupakan bagian dari substansi dokumen Kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami. Disparitas antara prakiraan kebutuhan saat terjadi bencana dengan ketersediaan sumber daya menjadi poin untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini dan prakiraan di saat terjadi bencana. Dengan kondisi yang belum dilakukan perubahan dan perbaikan dokumen secara komprehensif sejak 2012,

maka kesiapan Dokumen Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Sumatera Barat diragukan masih dapat mewakili kondisi terbaru Sumatera Barat khususnya wilayah rawan tsunami. Sehingga juga diragukan dapat menjadi acuan rencana operasi ketika terjadi bencana. Dengan asumsi ketidaksiapan tersebut, maka akan sangat menyulitkan dalam penanggulangan bencana tsunami yang resiko dan probabilitasnya berdasarkan kajian ahli sangat tinggi di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Barat.

Dalam situasi seperti ini terlihat bahwa dokumen Rencana Kontinjensi yang telah ada belum begitu update khususnya dalam hal koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana tsunami. Selain update dan pemutakhiran, pemerintah juga harus lebih aktif melakukan sosialisasikan isi dokumen Rencana Kontinjensi tersebut kepada masyarakat mengenai teknis dan cara terbaik menghadapi situasi bencana tsunami. Agar masyarakat lebih siap dan tidak terjadi kepanikan saat evakuasi. Berangkat dari situasi di atas, penelitian ini akan membahas tentang evaluasi konten kebijakan dalam Perencanaan Kontinjensi Tsunami Provinsi Sumatera Barat tahun 2012. Evaluasi konten kebijakan ini akan mengarah pada tahap updating dan pemutakhiran dokumen Rencana Kontinjensi tersebut untuk menganalisis kesiapan dokumen Rencana Kontinjensi dalam menghadapi bencana tsunami pada situasi saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah ada yang membahas tentang manajemen bencana dan fokus pada rencana kontinjensi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lestari P dkk (2018), Belford (2021), Forbes

(2009), Reidy dkk (2015), Inkinen dkk (2021), Arinaldi (2015) dan Mabaso & Mayena (2013) yang fokus penelitiannya membahas Rencana kontinjensi sebagai acuan rencana operasi dan rencana aksi pada saat terjadi bencana. Penelitian-penelitian tersebut juga membahas tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sedangkan penelitian Lestari P dkk (2018) memfokuskan penelitian mereka pada model yang digunakan dalam sistem manajemen bencana. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Alhadi dkk (2018) yang menganalisis masalah dalam penyusunan Rencana Kontinjensi. Sementara penelitian ini tidak memfokuskan kajian tentang Rencana Kontinjensi sebagai acuan teknis kegiatan ataupun rencana operasi dalam menghadapi bencana, melainkan Rencana Kontinjensi sebagai sebuah dokumen kebijakan publik. Mengacu pada penelitian Alhadi dkk (2018), penelitian ini tidak memfokuskan bahasan dalam proses penyusunan Rencana Kontinjensi, akan tetapi lebih berfokus pada pemutakhiran dan keberlanjutan Rencana Kontinjensi tersebut, serta menemukan model Rencana Kontinjensi yang tepat dalam Penanganan Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat.

Menurut BNPB, kontinjensi adalah suatu kejadian yang bisa terjadi, tetapi belum tentu benar-benar terjadi. Oleh karena ada unsur ketidakpastian, maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi. Perencanaan kontinjensi merupakan suatu upaya untuk merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi. Atas dasar pemikiran itu, maka perencanaan kontinjensi didefinisikan

sebagai berikut: "Perencanaan kontinjensi adalah proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah, atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi". (BNPB, 2008). Sementara UNHCR (2011) menyebutkan Rencana Kontinjensi (Contingency Planning) adalah sebagai berikut: Contingency planning is a management tool used to analyze the impact of potential crises so that adequate and appropriate arrangements are made in advance to respond in a timely, effective and appropriate way to the needs of affected populations. Contingency planning is a tool to anticipate and solve problems that typically arise during a humanitarian response.

Dari definisi tersebut, dapat diambil beberapa butir penting tentang perencanaan kontinjensi yaitu:

1. Dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan.
2. Lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen.
3. Merupakan suatu proses pembangunan konsensus untuk menyepakati skenario dan tujuan yang akan diambil.
4. Merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan sistem penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi.
5. Mencakup upaya-upaya yang bersifat mencegah dan juga membatasi konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi. (BNPB, 2008)

Berdasarkan beberapa penelurusan referensi, konsep kontinjensi memiliki beberapa pengertian. Pertama, kontinjensi dimaknai sebagai pedoman untuk bertindak dalam mengurangi dampak risiko bencana (Subiyakto, 2020). Kedua, kontinjensi didefinisikan sebagai langkah dalam mengambil tindakan untuk mengurangi dampak risiko bencana dari pelatihan, pelatihan, pengorganisasian dan penyelesaian, peninjauan rencana, peringatan dini, pendidikan dan informasi publik (Choularton, 2007), (Subiyakto, 2020); respon dan reaksi (Schneider 2004). Ketiga, rencana kontinjensi diartikan sebagai proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak pasti, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi peristiwa disusun untuk mencegah, atau mengatasi dengan lebih baik, situasi atau situasi darurat yang dihadapi (Subiyakto, 2020).

Keragaman definisi menegaskan pemahaman umum tentang perencanaan kontinjensi harus mencakup proses penyiapan awal sehingga dapat membuat perencanaan atau mengembangkan strategi dan prosedur dalam menanggapi potensi krisis atau keadaan darurat yang akan terjadi. Ini termasuk mengembangkan skenario (untuk mengantisipasi krisis), menentukan tanggung jawab semua aktor yang akan terlibat dalam mengidentifikasi peran dan sumber daya, proses pengumpulan dan diseminasi data, dan mengatur setiap aktor agar siap saat dibutuhkan, dan menentukan kebutuhan untuk tujuan yang ingin dicapai (Subiyakto, 2020). Perencanaan kontinjensi merupakan bagian integral dari keseluruhan program kesiapsiagaan dan perlu dikembangkan untuk setiap jenis

bahaya, kemudian dimutakhirkan dan dilatih secara berkala (Spahn et al, 2010), (Subiyakto, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat pada fokus penelitian yaitu evaluasi dokumen Rencana Kontinjensi pada tahap konten kebijakan atau sebelum implementasi kebijakan khususnya pada tahap pemutakhiran dan uji coba Rencana Kontinjensi serta menemukan model Rencana Kontinjensi yang tepat dalam Penanganan Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini digunakan sebagai rekomendasi pemutakhiran dan updating terhadap dokumen Pemerintah Daerah terkait Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan menjelaskan evaluasi kebijakan perencanaan kontinjensi tsunami Provinsi Sumatera Barat berbasis konsep responsivitas kebijakan publik.

Pada penelitian ini, konsep evaluasi kebijakan publik yang digunakan adalah konsep yang dipaparkan oleh Dunn (2000) yang relevan dengan kebutuhan penelitian, khususnya yang berfokus kepada responsivitas kebijakan rencana kontinjensi tsunami di Sumatera Barat. Dengan deskriptor evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn tersebut, kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat dapat dipaparkan dengan lebih optimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kebijakan itu sendiri. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari sebuah kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kebijakan yang tertuang dalam program. Konsep

Dunn di atas digunakan dalam menganalisa temuan penelitian.

Sebagai urgensi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran hasil evaluasi kebijakan secara substantif bahwa pentingnya Rencana Kontinjensi yang update dengan kondisi terkini baik dalam segi analisis sumberdaya dan dampak bencana maupun kebijakan yang mengikat para stakeholders dalam penanganan resiko bencana Tsunami. Sehingga diharapkan kebijakan penanggulangan bencana dapat dikelola dan diimplementasikan dengan baik. Manfaat dari penelitian ini secara teoritik adalah menghasilkan evaluasi terhadap kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan bencana khususnya dilihat dari pemanfaatan konsep evaluasi kebijakan publik yang relevan sebagai pisau analisis dalam menganalisa temuan penelitian.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik khususnya penanganan bencana daerah. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya dalam pembahasan evaluasi kebijakan serta penanganan bencana daerah khususnya bencana Tsunami.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang dilihat dari perolehan data selama penelitian berlangsung, dimana penelitian ini mendeskripsikan cara-cara hidup, cara-cara pandang, ataupun ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti terkait dengan suatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan data subyektif yang merupakan

perspektif dari pelaku yang diteliti (informan) tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Moelong (2002) yang mengemukakan bahwa “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.” (Moleong, 2002).

Manajemen Penelitian memberikan batasan pengertian tentang penelitian deskriptif, yaitu Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variable, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Yang umum adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Arikunto, 2010).

Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, pengamatan/observasi dan studi dokumen. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini, peneliti menentukan orang-orang atau informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi informan kunci yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa informan yang dipilih tersebut bertanggung jawab dan memiliki kewenangan serta berperan aktif di dalam menjalankan dalam kebijakan penanggulangan bencana Sumatera Barat. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

| No | Informan | Alasan Pemilihan Informan |
|----|--|--|
| 1. | Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumatera Barat | Person yang menjadi salah satu pimpinan di BPBD Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Diharapkan dapat informasi tentang kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat |
| 2. | Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Barat | Personal yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perencanaan kebijakan termasuk penanggulangan bencana. Diharapkan mendapat informasi tentang evaluasi kebijakan Rencana Kontinjensi tsunami Sumatera Barat. |
| 3. | Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Sumatera Barat | Pimpinan Forum Resmi Kebencanaan berdasarkan regulasi yang relevan dan menjadi bagian dalam perumusan dan implementasi berbagai kebijakan pengurangan resiko bencana. Diharapkan banyak mendapatkan informasi dari segi peran pemerintah dan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana tsunami. |
| 4. | Pendiri-Pimpinan Komunitas Siaga Tsunami | Pimpinan LSM/NGO Kebencanaan |

| | | |
|----|---|---|
| | | yang menjadi bagian dalam advokasi, perumusan dan implementasi berbagai kebijakan pengurangan resiko bencana. Diharapkan banyak mendapatkan informasi dari segi peran pemerintah dan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana tsunami. |
| 5. | Tenaga Ahli <i>Disaster Risk Reduction</i> /Konsultan BNPB RI | Tenaga Ahli/Konsultan Kebencanaan yang menjadi bagian dalam perumusan dan implementasi berbagai kebijakan pengurangan resiko bencana. Diharapkan banyak mendapatkan informasi dari segi strategis, takti dan teknis manajemen penanggulangan bencana, khususnya kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat. |
| 6. | Pakar-Peneliti di Bidang Manajemen dan Kebijakan Penanggulangan Bencana | Person yang mempunyai kepakaran dan keahlian berbasis hasil riset dalam bidang manajemen resiko bencana. Diharapkan mendapat informasi dari segi akademik terhadap kebijakan Rencana Kontinjensi tsunami Sumatera Barat. |

Lebih lanjut, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi baik dengan cara membandingkan antara hasilwawancara dengan observasi, wawancara dengan dokumen dan observasi dengan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rensposivitas yang dimaksud di sini adalah melihat kemampuan dan kesiapan lembaga dalam menjalankan substansi dari Dokumen Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya. Untuk saat ini kemampuan dan respons institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana seperti yang diamanahkan di dalam Dokumen Rencana Kontinjensi Tsunami dapat dikatakan belum teruji. Persoalan utama, bukan karena rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat belum pernah diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan ketentuan, karena memang tsunami belum pernah terjadi pasca dokumen ini disahkan. Melainkan lebih karena untuk memastikan kemampuan dan kesiapan diperlukan berbagai uji dan simulasi berdasarkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Uji dan simulasi ini yang belum dilakukan secara berkala sejak tahun 2018 dimana proses review singkat pernah dilakukan pada dokumen rencana kontinjensi tsunami ini. Sehingga, dengan kondisi yang ada saat ini dan terus berkembang, baik dari sisi Penilaian Bahaya, Penentuan Kejadian dan Pengembangan Skenario Kejadian Bencana, Penetapan Tujuan dan Strategi Tanggap Darurat, Perencanaan Bidang dan Rencana Tindak lanjut mestinya dijadikan landasan untuk melakukan proses review sesegara mungkin.

Lebih lanjut, indikator responsivitas yang baik belum

dipenuhi sebagai bagian dari evaluasi kebijakan publik. Responsivitas insitusi dibutuhkan dalam penanggulangan darurat bencana khususnya tsunami sehingga siap menghadapi skenario terburuk yang dapat dikelola. Dalam rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat aspek responsivitas ini belum dipenuhi karena belum ada feedback dari institusi yang menjadi bagian dari penyusunan tersebut dan memiliki peran dalam upaya tanggap darurat bencana. Responsivitas ini juga dilihat dalam proses penyusunan dokumen terkadang komitmen institusi untuk mengirimkan pegawai yang mempunyai data, kapasitas dan kewenangan yang dibutuhkan pada jabatannya belum dilakukan. Sehingga rencana kontinjens tsunami yang disusun belum mendapatkan input data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan upaya tanggap darurat bencana.

Dalam proses penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di berbagai daerah, baik dokumen kajian resiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi bencana, personel yang diminta mewakili institusi tidak dikirim berdasarkan kapasitas dan kewenangannya, sehingga sulit memberikan respons dan feedback yang dibutuhkan dalam dokumen, khususnya terkait data, informasi dan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Sederhananya, dalam undangan diminta untuk mengirimkan pejabat minimal setingkat eselon III, tetapi yang dikirim dalam perumusan substansi kebijakan adalah staf biasa yang tidak punya akses data dan kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan.

Lebih lanjut temuan penelitian menjelaskan bahwa, untuk akurasi data dan informasi yang digunakan

dalam rencana kontinjensi, instansi yang menjadi pemangku kepentingan diharuskan untuk menyediakannya dengan status terbaru, sehingga relevansinya dengan kondisi saat ini bisa dipenuhi. Permasalahan ini yang tak jarang menjadi tantangan dalam penyusunan rencana kontinjensi. Respons dari para pihak yang terlibat belum memenuhi harapan dalam penyusunan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat ini. Pengalaman kami dalam melakukan pendampingan dan advokasi kebijakan penanggulangan bencana, termasuk dalam penyusunan dokumen rencana kontinjensi, personal yang diutus tidak memiliki akses untuk data dan informasi yang dibutuhkan, bahkan tidak jarang belum memahami tugas dan fungsi institusi dalam penanggulangan bencana. Sehingga kontribusinya tidak signifikan dalam perumusan kebijakan tersebut dan efeknya adalah dokumen yang disusun belum menyediakan data dan informasi yang relevan sehingga perencanaan strategis dan taktis yang disusun juga belum optimal.

Ini yang harus menjadi perhatian dan komitmen semua pihak untuk diperbaiki dalam proses review yang harus segera dilakukan. Dalam proses penyusunan kebijakan rencana kontinjensi bencana termasuk tsunami, yang diminta selalu minimal eselon 3 sebagai bentuk keterwakilan pihak lembaga yang bertanggung jawab. Namun pada faktanya yang dikirim adalah staf biasa yang belum mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Padahal kebijakan rencana kontinejnsi ini membutuhkan komitmen dari para pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Misalnya pengerahan sumber daya, staf biasa tidak punya kewenangan mengambil keputusan dalam uji rencana

kontinjensi, sehingga proses tersebut berjalan tidak efektif.”

Institusi yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan dalam penanggulangan bencana termasuk dalam perumusan dan penerapan rencana kontinjensi ketika tanggap darurat bencana, mesti memiliki persepsi dan komitmen yang baik bahwanya bencana adalah urusan bersama atau publik. Sehingga dalam prosesnya, keterlibatan para pihak tersebut mesti diimplementasikan dalam bentuk respons memberikan feedback dengan mengirimkan personel yang memiliki akses data dan informasi serta mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan. Seringkali instansi mengirim utusan yang kurang tepat. Seharusnya yang hadir adalah personel yang akan bertanggung jawab langsung di lapangan, misal pada instansi satpol PP seharusnya yang hadir adalah minimal pada level Kabidops/kasiops. Tetapi selama ini yang banyak dikirim yakni bagian perencanaan/sekretariat. Tak jarang juga yang menghadiri adalah anggota sedangkan seharusnya yang hadir diharapkan yang memegang kendali dan tanggung jawab di lapangan, minimal pada level kepala bidang atau kepala seksi. Secara substansi, kehadiran petugas lapangan yang punya tanggung jawab praktis sehingga bisa mengambil keputusan cepat saat bencana.”

Berdasarkan temuan penelitian, BPBD Sumatera Barat selalu mengirimkan undangan kepada Instansi terkait untuk mengirimkan personel yang mempunyai akses data yang dibutuhkan, dan juga ada kewenangan untuk mengambil keputusan baik saat penyusunan dokumen, uji, bahkan jika bencana benar-benar terjadi. Idealnya yang menjadi person in charge adalah minimal eselon 3 di pemerintahan

atau perwira operasi di TNI dan Kepolisian. Contohnya pada saat workshop awal dan uji publik OPD di level Kabupaten/Kota dilibatkan tetapi pada diskusi teknis penyusunan dokumen kebijakan rencana kontinjensi tidak lagi dilibatkan. Diskusi teknis hanya melibatkan OPD dan instansi vertikal serta kelompok masyarakat/NGO pada level provinsi. Terutama dalam mengambil data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk penyusunan renkon, misal data penduduk. Selanjutnya yang mesti diuji adalah bagaimana komunikasi dan rantai peringatan dini antara pemerintah provinsi dengan kab/kota khususnya antara 7 kab/kota terdampak resiko Tsunami. Tahapan ini yang dilakukan pada saat gladi lapangan yang akan menjadi acuan dalam proses review. Pada tahap ini juga menguji bagaimana mobilisasi 7 kab/kota, peralatan dan uji SOP komunikasi dan peralatan sumberdaya. Hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga belum pernah dilakukan hingga saat ini.

Merujuk kepada konsep yang disampaikan oleh Dunn (2003), deskriptor responsivitas menjadi salah satu poin utama dalam evaluasi kebijakan publik. Pada kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat, responsivitas berfokus kepada kesiapan pemangku kepentingan dalam merespons skenario terburuk jika terjadi bencana. Berdasarkan temuan penelitian, kesiapan para pemangku kepentingan dalam menghadapi resiko terburuk bencana tsunami yang diprediksi dalam kajian resiko bencana belum teruji karena upaya latihan dan simulasi berbasis dokumen rencana kontinjensi tersebut belum dilakukan secara berkala. Pada proses penyusunan dokumen kebencanaan tersebut, tidak

jarang banyak instansi belum mengirimkan SDM yang memiliki kapasitas dan kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan.

Lebih lanjut berdasarkan konsep responsivitas pada kebijakan publik adalah berfokus kepada tindakan pemerintah yang selaras dengan preferensi para pemangku kepentingan (Riege & Lindsay, 2006), (Yang & Pandey, 2007), (Bryer, 2007). Responsivitas kebijakan terhadap opini publik merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan organisasi, kondisi dan situasi yang ada (Baum & Potter, 2008), (Yang, 2023), (Hanney et al, 2023). Sementara itu, konsep mengenai daya tanggap kebijakan menyoroti beberapa poin penting, yaitu:

Pertama, responsivitas kebijakan berfokus kepada Permasalahan Krusial: Kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sangat penting cenderung lebih responsif terhadap preferensi publik (Heath & Palenchar, 2008), (Fiorino, 2010). Pengambil kebijakan harus memprioritaskan isu-isu krusial yang harus dituntaskan. Dalam kebijakan rencana kontinjensi, persoalan yang krusial adalah perlunya pembaharuan kajian resiko bencana untuk menentukan skenario terburuk. Selain itu, aspek kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang krusial. Berdasarkan temuan penelitian, para pemangku kepentingan dalam kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat belum melaksanakan pemecahan persoalan di atas.

Kedua, responsivitas kebijakan berfokus kepada intensitas preferensi publik: Intensitas preferensi publik terhadap suatu kebijakan dapat mempengaruhi implementasinya (Zahir, 1999), (Jones & Baumgartner,

2005). Pemerintah harus memperhatikan kekuatan dukungan para pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan, karena hal ini dapat mempengaruhi kemungkinan penerapannya. Pada kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat, para pemangku kepentingan yang berwenang diperkirakan belum memiliki pengetahuan dan kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya proses simulasi dan *drill* untuk menguji rencana kontinjensi tsunami tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari dua point di atas dapat dijelaskan bahwa dari dua deskriptor responsivitas yaitu fokus pada permasalahan krusial dan intensitas preferensi, berdasarkan temuan penelitian belum dilaksanakan dalam kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat.

Penelitian ini secara substansif berfokus kepada kebijakan rencana kontinjensi berorientasi untuk memastikan penanggulangan bencana lebih responsif kedepannya. Namun demikian pada kebijakan tersebut perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif dan dilakukan proses uji melalui berbagai skema. Selanjutnya mesti ditindaklanjuti dengan melakukan proses *review* untuk memastikan kesiapan rencana kontinjensi ketika terjadi bencana.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi kebijakan khususnya di bidang penanggulangan bencana dengan menggunakan konsep dan indikator/deskriptor evaluasi kebijakan publik khususnya pada deskriptor responsivitas sebagai pisau analisis terhadap temuan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu

bentuk rekomendasi kebijakan berbasis riset (research based policy) kepada pemangku kepentingan yang relevan untuk memperbaiki dan memperbaharui kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang ada saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penelitian terkait evaluasi kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa pada aspek responsivitas yaitu fokus pada permasalahan krusial dan intensitas preferensi, berdasarkan temuan penelitian belum dilaksanakan dalam kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat sehingga direkomendasikan bahwa: Pertama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *leading sector* disarankan untuk melakukan proses uji rencana kontinjensi tsunami yang dilanjutkan dengan proses review sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaharui dokumen agar relevan dengan resiko, ancaman, ketersediaan dan kebutuhan sumber daya. Kedua, proses uji dan review tersebut sebagai metode evaluasi untuk memastikan kelayakan dan kesiapan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat mesti melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana termasuk di dalamnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

REFERENSI

Alhadi, Z., Maani, K. D., Nurhabibi, P., & Syarief, A. (2018). An analysis of problem in composing of tsunami contingency plan in Padang City. In MATEC Web of Conferences (Vol. 229, p. 03007). EDP Sciences.

- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arinaldi, J. (2015). Strengthening provincial role in disaster preparedness: A case study of the Local Agency for Disaster Management at Lampung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 32-38.
- Belford, N. C. (2021). Contingency Planning Amidst a Pandemic. *Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice*, 2021(1), 3.
- BNPB. (2008). *Perencanaan Kontinjensi*. Jakarta
- Choularton, R. (2007). Contingency planning and humanitarian action: a review of practice.
- Dunn, Willian N. (2000) . *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dunn, Willian N. (2000) . *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Fiorino, D. J. (2010). Sustainability as a conceptual focus for public administration. *Public administration review*, 70, s78-s88.
- Forbes, N. (2009). Contingency planning for earthquakes in Asia. *Journal of Business Continuity & Emergency Planning*, 3(4), 356-367.
- Heath, R. L., & Palenchar, M. J. (2008). *Strategic issues management: Organizations and public policy challenges*. Sage Publications.
- Inkinen, S., Williams, V., & Hoque, W. M. (2021). Effect of Contingency Planning on Survival of the Hotels in California, USA amid COVID 19 pandemic. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 4(2).
- Jones, B. D., & Baumgartner, F. R. (2005). A model of choice for public policy. *Journal of public*

- administration research and theory, 15(3), 325-351.
- Lestari, F., Pelupessy, D., Jibiki, Y., Putri, F. A., Yurianto, A., Widyaputra, G., ... & Imamura, F. (2018). Analysis of complexities in Natech disaster risk reduction and management: A case study of Cilegon, Indonesia. *Journal of Disaster Research*, 13(7), 1298-1308.
- Lestari, P., Paripurno, E. T., Kusumayudha, S. B., & Nugroho, A. R. B. (2018). Model Of Communication Planning For Contingency Plan Of Disaster Risk Management Sinabung Volcano Eruption.
- Lexy, J. Moleong. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mabaso, E., & Manyena, S. B. (2013). Contingency planning in southern Africa: Events rather than processes?. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 5(1), 1-8.
- Schneider, R. O. (2004), An overview of the "new" emergency management. *Journal of Emergency Management*, 2(1), 25-28.
- Spahn, H., Hoppe, M., Vidiarina, H. D., & Usdianto, B. (2010). Experience from three years of local capacity development for tsunami early warning in Indonesia: challenges, lessons and the way ahead. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 10(7), 1411-1429.
- Subiyakto, R. (2020). Reduction of Natural Disaster Risk Through Contingency Plan in Cilacap District. *Prizren Social Science Journal*, 4(1), 35-41.
- UNHCR. (2011). *Contingency Planning*, Tokyo Japan
- Zahir, S. (1999). Synthesizing Intensities of Group Preferences in Public Policy Decisions Using the AHP: Is It Time for the "New Democracy"? *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 16(4), 353-366.